

# PENDAMPINGAN PENYUSUNAN SOP DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

Siti Syahsudarmi<sup>1</sup>; Rasyid Abdillah<sup>2</sup>; Ririn Handayani<sup>3</sup>; Adi Rahmat<sup>4</sup>; Arizal N<sup>5</sup>

Universitas Lancang Kuning  
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581  
E-mail : [sitisyahsudarmi@unilak.ac.id](mailto:sitisyahsudarmi@unilak.ac.id) (Koresponding)

**Abstract:** Village-Owned Enterprises (BUMDes) are a strategic initiative of the Indonesian government in encouraging village economic independence. This research aims to develop and implement Standard Operating Procedures (SOPs) at BUMDes Maju Bersama in Sawah Village, Kampar District, Kampar Regency, Riau Province. Through a participatory approach, this service activity involves BUMDes managers, village heads, and local communities in the process of identifying needs, drafting SOPs, as well as implementation and evaluation. The results of the service showed that the implementation of SOPs significantly improved operational efficiency by 30%, BUMDes revenue increased by 25%, and the level of stakeholder satisfaction reached 85%. The active participation of the community and managers in drafting the SOPs creates a stronger sense of belonging to the BUMDes, encouraging participation in the programs offered. With business diversification in accordance with local potential, BUMDes can reduce dependency on existing business sectors and improve community welfare in a sustainable manner. This research is expected to inspire other villages to implement similar practices to achieve Sustainable Development Goals (SDGs).

**Keywords:** *BUMDes, Standard Operating Procedures, Economic Independence, Business Diversification, Community Participation.*

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan inisiatif strategis pemerintah Indonesia untuk mendorong kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat desa. BUMDes berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi desa.

Menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, hingga tahun 2023, terdapat lebih dari 75.000 BUMDes yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, peningkatan kuantitas ini tidak selalu diiringi dengan kualitas pengelolaan yang memadai. Penelitian oleh Sari et al. (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 40% BUMDes di Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, mengalami kesulitan operasional akibat kurangnya panduan kerja yang sistematis. BUMDes Maju Bersama di Desa Sawah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia, saat ini masih

bergantung pada empat lini usaha utama, yaitu unit simpan pinjam, perdagangan (alat tulis kantor/ATK), penyediaan pupuk dan alat pertanian, serta layanan sebagai agen Brilink. Meskipun lini usaha ini memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa, BUMDes masih perlu menambah unit usaha baru yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal untuk memperluas cakupan bisnis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Desa Sawah memiliki potensi sumber daya lokal yang dapat dikembangkan, seperti budidaya ikan melalui keramba, peternakan ayam, pengolahan hasil pertanian, atau bahkan pariwisata berbasis desa. Diversifikasi usaha ini dapat membantu BUMDes mengurangi ketergantungan pada sektor usaha yang ada saat ini sekaligus membuka peluang baru untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selain itu, pengelolaan usaha yang lebih baik melalui penerapan tata kelola berbasis Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terstruktur sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap unit usaha dapat beroperasi secara efisien, terarah, dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan pengelolaan yang lebih profesional, BUMDes Maju Bersama dapat memperkuat kontribusinya dalam mendukung program pemerintah, mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan meningkatkan ketahanan ekonomi desa di Kecamatan kampar Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sebagaimana diungkapkan oleh Hazairin et al. (2022) dalam jurnalnya bahwa kelemahan dalam diversifikasi usaha dan tata kelola yang kurang sistematis merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya keberlanjutan BUMDes.

#### Urgensi Penyusunan SOP

Dalam konteks manajerial, Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah instrumen penting yang berfungsi menciptakan konsistensi, efisiensi, dan transparansi dalam operasional organisasi, termasuk BUMDes. SOP memastikan bahwa setiap anggota organisasi memahami dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas.

Namun, banyak BUMDes yang belum memiliki SOP yang terdokumentasi dengan baik. Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan keterampilan pengelola dalam menyusun SOP yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Oleh karena itu, pendampingan dalam penyusunan SOP menjadi krusial untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes dan memberdayakan kapasitas pengelolanya.

#### Landasan Teori dan Literatur Pendukung

Penelitian terdahulu menegaskan pentingnya SOP dalam meningkatkan kinerja organisasi. Misalnya, studi oleh Pratama dan Wijaya (2021) menyatakan bahwa penerapan SOP yang baik dapat

meningkatkan efisiensi operasional dan konsistensi kerja dalam organisasi

Selain itu, penelitian oleh Nugroho (2020) menyoroti bahwa SOP membantu dalam mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi

Dalam konteks organisasi berbasis komunitas seperti BUMDes, penerapan SOP yang efektif dapat membantu mengatasi tantangan manajerial dan operasional yang sering dihadapi, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara lebih efisien dan efektif.

#### Tujuan Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam penyusunan SOP bagi pengelola BUMDes, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Selain itu, melalui pendampingan ini, diharapkan kapasitas pengelola BUMDes dalam manajemen operasional dapat ditingkatkan, sehingga mampu mengelola usaha desa secara lebih profesional dan berkelanjutan

## METODE

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pendekatan partisipatif, yang mengutamakan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, yakni pengelola BUMDes, kepala desa, serta masyarakat setempat. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap proses penyusunan SOP yang sedang dilakukan, sehingga keberlanjutan implementasinya dapat terjamin. Selain itu, partisipasi aktif dari seluruh pihak akan memperkaya informasi yang diperoleh, memastikan bahwa SOP yang disusun relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi lokal.

#### Tahapan Pelaksanaan

##### 1. Identifikasi Kebutuhan

Pada tahap ini, dilakukan observasi lapangan untuk memetakan kondisi eksisting BUMDes dan menggali

permasalahan operasional yang dihadapi. Melalui wawancara mendalam dengan pengelola BUMDes, kepala desa, dan masyarakat, akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan, kendala, dan potensi yang ada. Selain itu, diskusi dengan stakeholders terkait juga akan digunakan untuk memahami kebutuhan spesifik terkait pengelolaan usaha dan prosedur operasional yang diperlukan.

## 2. Penyusunan SOP

Setelah kebutuhan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP). Untuk itu, dilaksanakan workshop bersama pengelola BUMDes yang akan mengarahkan mereka dalam merancang SOP yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Proses penyusunan akan mengacu pada prinsip-prinsip manajemen yang berbasis pada efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan usaha. Di sini, peserta akan dibimbing untuk menyusun SOP yang mencakup seluruh aspek operasional usaha, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

## 3. Implementasi dan Evaluasi

Pada tahap implementasi, pendampingan langsung akan diberikan kepada pengelola BUMDes untuk memastikan bahwa SOP yang disusun dapat diterapkan secara efektif. Selama tahap ini, pendampingan akan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam penerapan SOP.

Evaluasi efektivitas SOP akan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil dari evaluasi ini akan memberikan umpan balik untuk perbaikan lebih lanjut dalam implementasi SOP di masa mendatang.

### Metode Pengumpulan Data

- Data Kualitatif:  
Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui beberapa metode, antara lain:
  - Observasi langsung terhadap aktivitas operasional BUMDes, untuk mendapatkan gambaran

mengenai kondisi yang ada dan bagaimana pengelola berinteraksi dengan masyarakat serta menjalankan usahanya.

- Wawancara mendalam dengan pengelola BUMDes, kepala desa, dan masyarakat untuk menggali persepsi dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes.
- Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan pemangku kepentingan untuk memahami pandangan kolektif dan mendiskusikan solusi yang relevan untuk pengelolaan BUMDes yang lebih baik.
- Data Kuantitatif:  
Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui kuesioner yang disebarkan kepada pengelola BUMDes dan masyarakat untuk mengevaluasi pemahaman mereka mengenai SOP yang baru disusun dan diterapkan. Selain itu, kuesioner juga digunakan untuk mengukur performa operasional BUMDes setelah penerapan SOP, seperti peningkatan efisiensi operasional dan pendapatan.

### Instrumen Evaluasi

Evaluasi efektivitas dari penerapan SOP dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disepakati bersama, yaitu:

1. Tingkat Efisiensi Operasional  
Mengukur sejauh mana SOP membantu memperlancar proses operasional dan mengurangi pemborosan sumber daya. Efisiensi dapat dilihat dari pengurangan waktu operasional, penyelesaian tugas yang lebih cepat, dan penggunaan sumber daya yang lebih optimal.
2. Peningkatan Pendapatan  
Melihat dampak langsung dari implementasi SOP terhadap pendapatan BUMDes, baik dari peningkatan penjualan produk maupun diversifikasi usaha yang dilakukan setelah SOP diterapkan.
3. Kepuasan Stakeholder

Mengukur tingkat kepuasan pengelola, masyarakat, dan pihak terkait lainnya terhadap sistem manajemen baru yang diterapkan, serta sejauh mana mereka merasa terlibat dalam proses perubahan ini.

Melalui pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif serta evaluasi berdasarkan indikator tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan implementasi SOP dan dampaknya terhadap keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan BUMDes

## HASIL

Pengabdian yang dilakukan dalam penyusunan dan implementasi SOP di BUMDes Maju Bersama menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Dari tahap identifikasi kebutuhan, observasi lapangan menghasilkan pemetaan yang jelas terhadap kondisi operasional BUMDes. Tim pendamping menemukan bahwa sebagian besar pengelola tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai manajemen usaha dan tata kelola yang efektif, yang menyebabkan kesulitan dalam operasional sehari-hari. Melalui wawancara dengan pengelola dan masyarakat setempat, teridentifikasi beberapa masalah utama seperti kurangnya ketertarikan masyarakat pada produk yang dihasilkan dan rendahnya partisipasi dalam program-program BUMDes.

Setelah analisis kebutuhan selesai, proses penyusunan SOP dilaksanakan melalui workshop dan diskusi kelompok. Para pengelola BUMDes dilibatkan secara aktif dalam merancang SOP yang mencakup setiap aspek operasional. Hasil dari workshop tersebut adalah rumusan SOP yang reflektif terhadap potensi lokal dan tantangan yang ada. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, SOP yang dihasilkan lebih memenuhi kebutuhan spesifik dan harapan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan rasa memiliki terhadap BUMDes.

Pada tahap implementasi, pengelola BUMDes Maju Bersama mendapatkan pendampingan langsung untuk menerapkan SOP yang telah disusun. Proses ini melibatkan

supervisi dan bimbingan untuk memastikan bahwa setiap langkah dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa pengelola mulai lebih terorganisir dalam menjalankan tugas mereka, dan adanya perbaikan dalam manajemen waktu serta penggunaan sumber daya.

Dalam evaluasi yang dilakukan pasca-implementasi, indikator efisiensi operasional menunjukkan peningkatan yang signifikan. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif mengalami pengurangan hingga 30%. Pengelola juga melaporkan bahwa mereka lebih mudah mengedukasi masyarakat tentang produk dan layanan BUMDes berkat adanya SOP yang jelas. Hal ini berkontribusi pada peningkatan komunikasi antara pengelola BUMDes dan masyarakat.

Dari segi pendapatan, observasi awal menunjukkan adanya peningkatan signifikan setelah penerapan SOP. Melalui diversifikasi usaha, misalnya pengembangan budidaya ikan dan pengolahan hasil pertanian, pendapatan yang dihasilkan BUMDes mengalami kenaikan sekitar 25%. Ini membuktikan bahwa dengan adanya SOP, pengelola bisa fokus pada potensi lokal yang ada dan mengembangkan usaha secara lebih terencana.

Kepuasan stakeholder juga menjadi salah satu indikator utama yang dievaluasi. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pengelola dan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes mengalami kenaikan yang signifikan. Dari survei, 85% responden menyatakan puas dengan berbagai perubahan yang diimplementasikan, sedangkan sisanya memberikan masukan untuk perbaikan yang lebih lanjut. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat merasa terlibat dalam pengelolaan BUMDes dan berkeinginan untuk lebih aktif berpartisipasi.

Selain itu, data kualitatif dari diskusi kelompok menunjukkan bahwa masyarakat mulai memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap BUMDes setelah adanya SOP. Mereka mulai memahami pentingnya

keterlibatan dalam program-program yang ditawarkan, seperti pelatihan dan edukasi tentang bisnis. Dengan kemandirian ekonomi yang lebih baik, masyarakat desa merasa lebih berdaya.

Sistem monitoring yang diterapkan pasca-implementasi juga memberikan kontribusi penting. Tim pendamping secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan SOP diimplementasikan secara konsisten. Pertemuan rutin dengan pengelola BUMDes meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, di mana setiap kendala dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki. Hal ini memperkuat komitmen pengelola untuk terus berupaya menyempurnakan operasional BUMDes.

Secara keseluruhan, pengabdian ini telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengelolaan BUMDes Maju Bersama. Proses yang partisipatif tidak hanya berkontribusi pada penyusunan SOP yang relevan dan bermanfaat, tetapi juga meningkatkan kapasitas pengelola dan partisipasi masyarakat. Penerapan metode yang tepat serta evaluasi berkelanjutan akan memastikan keberlanjutan perubahan positif yang telah dicapai.

Dalam jangka panjang, BUMDes diharapkan dapat berperan lebih efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi lokal dan diversifikasi usaha. Kerja sama antara pengelola, masyarakat, dan stakeholders lainnya sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan efektivitas program-program yang ada.

## PEMBAHASAN

Pentingnya penyusunan SOP di BUMDes Maju Bersama menjadi titik tekan yang krusial dalam pengabdian ini. Dengan tidak adanya SOP, pengelolaan usaha menjadi tidak terarah, dan pengelola sering kali terjebak dalam rutinitas yang tidak efisien. Penerapan SOP yang sistematis menjadi langkah awal untuk menciptakan struktur dan konsistensi yang diperlukan dalam operasional sehari-hari.

Proses partisipatif yang diterapkan

dalam penyusunan SOP menunjukkan bahwa keterlibatan pengelola dan masyarakat sangat berpengaruh. Partisipasi ini tidak hanya menciptakan rasa memiliki, tetapi juga mempermudah pemahaman tentang prosedur dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Dengan adanya kolaborasi antara pihak-pihak terkait, SOP yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan adaptif terhadap kondisi lokal.

Diversifikasi usaha yang dilakukan berdasarkan potensi lokal, seperti budidaya ikan dan pengolahan hasil pertanian, menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes bisa lebih inovatif. Usaha yang berkembang dengan baik mampu menarik minat masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi publik dalam program-program yang ditawarkan. Ini merupakan contoh nyata bagaimana penerapan SOP dapat mendorong kreativitas dalam pengelolaan usaha desa.

Peningkatan efisiensi operasional yang diukur setelah penerapan SOP menjadi indikator kunci dari keberhasilan pengabdian ini. Dengan SOP, pengelola BUMDes diberikan pedoman jelas yang membantu mereka menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan tepat. Efisiensi yang dicapai juga berkontribusi pada pengurangan pengeluaran yang tidak perlu, sehingga lebih banyak alokasi dana dapat diarahkan pada pengembangan usaha.

Dampak finansial dari penerapan SOP terlihat jelas di sisi pendapatan. Adanya peningkatan pendapatan yang signifikan mendorong pengelola untuk terus berusaha dan mengembangkan unit usaha baru. Pendapatan yang meningkat bukan hanya menjadi hasil dari diversifikasi usaha, tetapi juga dari peningkatan kualitas pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat.

Kepuasan stakeholder yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat merasa terlibat dalam proses perubahan yang terjadi. Keterlibatan ini penting karena akan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap BUMDes. Masyarakat yang merasa dilibatkan cenderung akan lebih mendukung program-program yang diusung, sehingga

menciptakan sinergi antara pengelola dan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi, monitoring yang dilakukan secara berkala adalah praktik yang baik untuk memastikan keberlanjutan penerapan SOP. Proses evaluasi yang rutin memungkinkan adanya perbaikan dan penyesuaian yang cepat atas segala kendala yang mungkin timbul. Hal ini juga mencerminkan pentingnya dukungan berkelanjutan dari tim pendamping untuk menciptakan BUMDes yang lebih baik.

Kesadaran akan pentingnya SOP dan tata kelola yang baik di BUMDes Maju Bersama membuka peluang bagi desa lain untuk menerapkan praktik serupa. Tidak hanya sebagai langkah meningkatkan kemandirian ekonomi, tetapi juga untuk menjadikan BUMDes sebagai pusat perekonomian yang transparan dan akuntabel. Ini merupakan langkah strategis dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Kehadiran SOP menjadi alat untuk meningkatkan legitimasi BUMDes di mata masyarakat. Dengan sistem manajemen yang jelas, masyarakat bisa lebih percaya bahwa BUMDes dikelola dengan baik dan berpotensi memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan mereka. Ini menjadi motivasi bagi pengelola untuk terus berinovasi dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Keberhasilan yang dicapai dalam pengabdian ini merupakan contoh nyata dari dampak positif yang bisa diperoleh dengan pendekatan yang tepat. Melalui pengelolaan yang lebih profesional berdasarkan pada penyusunan SOP yang efektif, BUMDes Maju Bersama telah melangkah menuju arah yang lebih baik dan sustainable.

## SIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan dan penerapan SOP di BUMDes Maju Bersama telah memberikan dampak yang positif dan signifikan. Implementasi SOP tidak hanya memperbaiki efisiensi operasional, tetapi juga meningkatkan

pendapatan dan kepuasan masyarakat.

Partisipasi aktif dari pengelola dan masyarakat dalam proses penyusunan SOP menjadi kunci keberhasilan program ini. Hal ini menciptakan rasa memiliki yang kuat terhadap BUMDes, sehingga mendorong masyarakat untuk lebih berperan serta dalam pengelolaan usaha. Dengan adanya sistem manajemen yang lebih baik, ke depan BUMDes berpotensi untuk berkembang secara berkelanjutan.

Diversifikasi usaha yang sesuai dengan potensi lokal menjadi strategi efektif untuk mengurangi ketergantungan pada sektor usaha yang ada. Dengan pengembangan budidaya ikan dan pengolahan hasil pertanian, BUMDes dapat meningkatkan pendapatan dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat desa.

Kehadiran SOP yang sistematis dan transparan menjadi fondasi yang penting bagi pengelolaan BUMDes yang lebih profesional. Hal ini akan membantu dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang mampu membantu kesejahteraan.

Secara keseluruhan, inisiatif penyusunan SOP di BUMDes Maju Bersama menjadi langkah strategis dalam mendukung ketahanan ekonomi desa dan mendorong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Pengabdian ini diharapkan menjadi inspirasi bagi desa lain untuk menerapkan praktik serupa dalam pengelolaan usaha desa di masa mendatang.

## DAFTAR RUJUKAN

- Hazairin, M. (2022). Analisis Kelemahan Diversifikasi Usaha pada Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 18(2), 123-135.
- Nugroho, A. (2020). Pentingnya SOP untuk Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi. *Jurnal Manajemen*, 15(1), 45-58.

- Pratama, R., & Wijaya, S. (2021). Efektivitas Penerapan Standard Operating Procedures dalam Organisasi. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 9(1), 67-78.
- Sari, D. et al. (2022). Tantangan Pengelolaan BUMDes di Kecamatan Labuan Amas Utara. *Jurnal Pembangunan Desa*, 4(3), 202-215.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2023). *Data Statistik BUMDes di Indonesia*.